



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JAMALUDDIN JOMPA
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 686793

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.161.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.005 m²/700 m² di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m²/90 m² di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 503.000.000
3. Tanah Seluas 5.000 m² di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 298.500.000
4. Tanah Seluas 20.000 m² di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/90 m² di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 740.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 54 m²/90 m² di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 810.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **450.500.000**

1. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 123.000.000
2. MOBIL, HONDA HR-V/MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000



4. MOTOR, YAMAHA FINO GRANDE 125 CC Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 3.605.864.218

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 9.217.864.218

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.217.864.218

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.